

Editorial: Parlemen Nasional, Jangan Sahkan Undang-undang Pensiun yang Rakus

Parlemen Nasional Timor-Leste baru saja meloloskan dua undang-undang (UU) yang akan mengatur pensiun dermawan untuk para mantan anggota parlemen dan mantan pejabat resmi (*ex-titulares de Órgãos de Soberania*), seperti Presiden Negara, Presiden Parlemen Nasional, Perdana Menteri, dan pejabat pemerintah. Sementara UU ini dibuat, krisis politik dan keamanan meliputi negara ini dengan ratusan ribu orang menjadi korban, dan mereka pengungsi ke seluruh negeri. Motivasi UU ini jelas: masa jabatan lima tahun untuk anggota parlemen sudah hampir habis. Sementara artikel ini ditulis pada bulan Februari, Presiden Republik baru memveto UU tersebut dan mengirimkan kembali ke Parlemen untuk direvisi.

Rancangan undang-undang ini tidak menarik banyak perhatian sampai saat Presiden memveto UU untuk mantan anggota Parlemen pada awal Desember. Setelah itu beberapa LSM memulai berbagai aktivitas, termasuk forum umum, untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang UU Pensiun. RUU tersebut tidak melalui dengar pendapat umum seperti halnya Parlemen tidak mau mendengar pendapat masyarakat. Anggota-anggota parlemen juga menolak untuk ikut serta dalam diskusi-diskusi atau untuk berbagi informasi tentang UU tersebut dengan masyarakat, dengan alasan bahwa UU itu sudah diloloskan oleh Parlemen Nasional sehingga diskusi harus menunggu sampai setelah presiden mengesahkannya. Hanya dua minggu kemudian, Parlemen telah mengirim kepada presiden sebuah RUU pensiun yang lain, kali ini untuk mantan pejabat tinggi pemerintah. Forum LSM Timor-Leste (Fongtil) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional awal bulan Januari telah mengorganisir sebuah seminar tentang kedua UU ini, yang dihadiri oleh Anggota Parlemen Manuel Tilman dari juga KOTA.

UU Pensiun untuk mantan pejabat telah diveto oleh Presiden pada tanggal 22 Januari. Menurut pendapat *Suara Timor Lorosa'e*, Xanana Gusmão memveto UU ini karena “tidak ada alasan dasar untuk merancang UU tersebut, UU ini tidak punya landasan konstitusional.” Mestinya mereka merancang UU dengan menetapkan siapa yang dimaksudkan sebagai pejabat tinggi (“titulares”) sebelum diproses menjadi UU Pensiun. Surat veto dari Presiden dibacakan di dalam sidang pleno Parlemen yang diketuai oleh Wakil Presiden Parlemen, Jacob Fernandes.

Isi kedua UU menunjukkan bahwa para anggota Parlemen hanya berpikir tentang bagaimana membuat hukum yang menjamin masa depan mereka dan anggota lain dari pemerintah yang hanya menjalankan masa tugas lima tahun. Itu juga menunjukkan bahwa mereka tidak sensitif terhadap krisis saat ini – mereka tidak merasakan penderitaan ratusan ribu orang yang menjadi pengungsi dan hidup dalam kamp-kamp pengungsi, atau dari mereka yang telah meninggal dunia karena konflik ini.

Sangat dermawan – untuk diri mereka sendiri

UU Pensiun untuk mantan anggota parlemen menyebutkan bahwa:

- mantan anggota Parlemen akan tetap menerima 100 persen gaji seumur hidupnya, mulai ketika mereka selesai tugas, dan penerimaan akan naik dengan kenaikan gaji parlemen di masa mendatang.
- pemerintah akan membayar perawatan medis di dalam atau di luar Timor-Leste jika dokter menyarankan.
- tanpa membayar pajak import, mereka bisa mengimpor satu mobil untuk dipakai pribadi dan semua bahan untuk membangun satu rumah pribadi.
- mereka berhak mendapat paspor diplomatik untuk mereka sendiri dan keluarga, dan “perjalanan bebas” ketika mereka perlu berpergian di dalam atau keluar negeri.

(bersambung ke halaman 22)

Apakah La’o Hamutuk itu?

La’o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor-Leste yang memantau, menganalisis, dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La’o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor-Leste harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La’o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor-Leste yang efektif. Selain itu, *La’o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor-Leste. Staf *La’o Hamutuk* baik itu staf Timor-Leste maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji. Terakhir, *La’o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor-Leste dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

La’o Hamutuk mempersilakan kepada mereka yang ingin menyalin kembali buletin atau foto yang ada dalam buletin dengan gratis. *Buletin* dan foto yang disalin harus tetap mencantumkan nama *La’o Hamutuk* sebagai sumber utamanya.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La’o Hamutuk mengharapkan anda menghubungi kami jika mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat Timor-Leste serta masyarakat internasional.

Editorial: Undang-undang Pensiun yang Rakus

(Lanjutan hari halaman 24)

UU Pensiun untuk mantan pejabat pemerintah menyebutkan bahwa:

- mereka juga akan menerima 100% dari gajinya setiap bulan, perawatan medis gratis di dalam atau luar negeri, dan paspor diplomatik.
- Impor bebas pajak satu mobil setiap lima tahun, dan semua bahan untuk membangun satu rumah pribadi.
- Di samping ini, pemerintah akan menyediakan
 - ◆ satu mobil pribadi, lengkap dengan sopir dan bensin
 - ◆ satu rumah lengkap dengan pengamanan
 - ◆ seorang asisten dan sekretaris pribadi
 - ◆ sebuah kantor lengkap dengan internet, dua telpon dan satu HP
 - ◆ dua perjalanan ke luar negeri setiap tahun, dengan dua pendamping.

Semua hak istimewa ini diberikan kepada setiap mantan anggota parlemen yang menjalankan tugasnya paling sedikit selama 3½ tahun dan kepada mantan pejabat pemerintah yang menjalankan tugasnya paling sedikit selama 4 tahun. Pejabat resmi yang belum bekerja selama empat tahun akan menerima tunjangan sebanding dengan jangka waktu ketika mereka bekerja.

Negara-negara lain

Anggota-anggota Parlemen sering mengatakan bahwa UU ini mirip dengan yang digunakan di negara-negara lain. Pada kenyataannya, di kebanyakan negara maju ada aturan yang tidak terlalu dermawan tentang berapa banyak pensiun yang diterima seorang mantan anggota parlemen, kapan itu akan diterima, berapa tahun tugas mesti dijalankan dan berapa persen harus dibayarkan dana pensiun sementara mereka masih bekerja dan menerima gaji.

Seorang anggota Kongres Amerika Serikat bisa mendapat maksimum 80 persen dari gajinya, kalau dia menjalankan tugas selama duapuluh tahun atau lebih. Tetapi, pensiun itu hanya akan diterima ketika umurnya cukup tua untuk berhenti bekerja. Mereka yang bertugas selama hanya lima tahun, seperti anggota kita, akan menerima di bawah 10 persen dari gajinya, dan hanya ketika umurnya mencapai 62 tahun. Karena masa jabatan seorang anggota Kongres adalah dua tahun, dia perlu dipilih tiga kali untuk mendapat jangka waktu lima tahun. Seorang yang hanya dipilih satu kali, seperti anggota Parlemen Timor-Leste, akan menjalankan tugas selama dua tahun dan tidak akan menerima pensiun.

Di kebanyakan negara yang memakai sistem pensiun, anggota parlemen harus memberikan bagian yang cukup besar dari gaji mereka sementara mereka masih bekerja ke dalam dana pensiun yang akan dibayarkan kembali ketika mereka berhenti bekerja.

Contohnya, di Portugal para anggota Majelis Republik membayar 6% dari gajinya ke dalam dana pensiun, dan akan berhak menerima pensiun yang mirip pensiun untuk pegawai negeri lain setelah menjalankan tugas selama lima tahun. Di

Australia potongan gaji adalah 11.5% untuk 18 tahun yang pertama, dan 5.75% untuk masa jabatan di atas 18 tahun. Kalau mereka berhenti bekerja kurang dari 8 tahun mereka tidak dapat pensiun sama sekali; di atas 8 tahun mulai dengan 50% dari gaji sampai dengan maksimum 75% dari gaji kalau sudah menjalankan tugas selama 18 tahun. Pensiun mulai dibayar pada usia 55 tahun.

Di negara yang kaya seperti Norwegia, yang mempunyai sistem kesejahteraan sosial yang kuat, anggota parlemen yang sudah berhenti bekerja menerima sampai 66% dari gajinya (setelah 12 tahun menjalankan tugas), dibayarkan mulai pada umur 65 tahun. Denmark menuntut 8 tahun tugas dan mulai membayar pensiun pada usia 67 tahun.

Pada 1998, Parlemen Mozambique mengatur sebuah UU Pensiun yang sangat dermawan untuk para anggotanya. RUU itu diveto oleh Presiden Joaquim Chissano dengan catatan “RUU ini mesti diperiksa kembali oleh Majelis karena menurut pendapat saya bisa membuat pengaruh sosio-ekonomis yang negatif dan sulit untuk bisa dipenuhi secara keuangan.” Chissano mendesak utusannya untuk memeriksa “keberlanjutan ekonomis dan sosial” usulan mereka dan bagaimana melaksanakannya itu “dengan dasar keadilan sosial.” Empat tahun kemudian Parlemen mengesahkan UU pensiun lain, yang memberikan kepada setiap utusan yang menjalankan tugas dua periode masa jabatan (sepuluh tahun) 100% dari gajinya ketika dia mencapai usia 60 tahun untuk laki-laki atau 55 tahun untuk perempuan. Para utusan yang hanya menjalankan tugas satu periode masa jabatan (lima tahun) tidak akan menerima pensiun, tetapi mereka berhak mendapat “tunjangan integrasi kembali” sebesar 50% dari gaji pokok untuk setiap tahun bekerja dalam Majelis. Selama aktif dalam Parlemen, seorang utusan membayar 13% dari gajinya ke dalam dana pensiun – walaupun dana tersebut cuma menutupi seperdelapan dari total dana pensiun. Jika seorang utusan membayar tambahan 1,5% dari gaji pokoknya, dia juga berhak menerima perawatan medis gratis dari Pelayanan Kesehatan Nasional Mozambique, atau evakuasi ke luar negeri.

Parlemen bekerja untuk siapa?

Setelah melihat berbagai negara lain, *La'o Hamutuk* berpendapat bahwa para Anggota Parlemen Timor-Leste telah memberikan pada diri mereka sendiri sesuatu pensiun yang paling dermawan di dunia. Mereka menarik keuntungan dari ketidakpastian dalam situasi yang sekarang ada, daripada mengikuti prosedur yang adil dan transparan. Sementara kebanyakan orang sedang berjuang untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya dari kekerasan dan kebakaran, para anggota Parlemen telah mengesahkan UU yang menguntungkan mereka sendiri dan mantan pejabat lain yang menjalankan tugas kurang dari lima tahun.

Kita semua tahu bahwa Timor-Leste adalah negara yang paling miskin di wilayah Asia Pasifik. Kebanyakan orang Timor-Leste hanya menerima 50 sen per hari, dan ada banyak yang belum punya penghasilan harian. Standar hidup kita di bawah garis kemiskinan. Banyak orang di Timor-Leste cuma bisa makan satu kali setiap hari.

Kenyataan yang sebenarnya ialah bahwa Timor-Leste mempunyai angka kematian bayi dan kematian ibu yang paling tinggi di dunia. Menurut Laporan Pembangunan Manusia UNDP 2006, angka kematian bayi di Timor-Leste 64 orang per 1.000, dan angka kematian ibu 660 orang per 100.000. Jika kita mau Timor-Leste punya masa depan yang kuat kita harus meningkatkan investasi untuk anak dan ibu kita, memperbaiki gizi dan pelayanan kesehatan mereka. Fasilitas kesehatan kita di daerah masih belum cukup, kita mesti membangunkannya untuk kesejahteraan semua orang di Timor-Leste. Walaupun Parlemen mungkin sudah lupa, itulah janji dalam Pasal 17 dari Konstitusi kita, yang menyatakan bahwa semua perempuan dan laki-laki punya hak dan kewajiban yang sama dalam semua bagian dari kehidupan keluarga, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Banyak anak yang tidak bisa dapat pendidikan oleh karena orangtua mereka tidak punya pekerjaan dan tidak ada uang untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Di daerah, kebanyakan sekolah belum berfungsi dengan baik. Bahkan di ibukota kita sistem pendidikan belum dibangun dengan bagus, dan cuma beberapa orang punya kemungkinan untuk pergi kuliah di negara lain. Pemerintah tidak mempunyai mekanisme untuk memberi beasiswa kepada anak-anak berprestasi yang tidak punya cukup uang untuk pergi ke sekolah, atau meneruskan studi mereka di universitas. Masyarakat muda kita tidak punya pekerjaan, dan itu mempengaruhi konflik yang kita alami di Timor-Leste saat ini.

Bulan Desember yang lalu seorang anggota dari Timor Teknis yang sedang melanjutkan penilaian polisi Timor-Leste menyatakan di dalam rapat umum *La'o Hamutuk* bahwa anggota-anggota PNTL tidak bisa melaksanakan tugas mereka dengan efektif karena fasilitas mereka. Mereka juga punya gaji yang sangat rendah, sama sekali belum cukup untuk mendukung keluarga mereka, yang mendorong mereka untuk jadi terlibat dalam aktivitas ilegal. Pasti itu akan mempengaruhi penegakan hukum di negara kita.

Jika UU Pensiun ini disahkan, Parlemen dan Pemerintah bukan lagi tempat untuk membuat dan mengimplementasi kebijakan publik; melainkan akan menjadi tempat untuk beberapa orang bergabung dengan kelas atas. Orang akan menjadi anggota Parlemen atau Menteri karena mau menaikkan statusnya, menjadi kaum elit, tidak membuat apa pun namun menerima uang dan hak-hak istimewa.

UU ini menunjukkan pada kita bahwa para politikus kita menyalahgunakan demokrasi. Demokrasi berarti kedaulatan terletak di tangan masyarakat, dan kekuasaan politik yang kita serahkan kepada parlemen mesti digunakan untuk melayani masyarakat – bukan suatu kelompok elit. Apa yang dibuat oleh wakil-wakil kita dengan UU ini sama sekali tidak menunjukkan pertimbangan atau hormat kepada para pemilik kedaulatan negeri kita, masyarakat Timor-Leste. **Oleh karena itu kami menganggap ini sebagai korupsi politik, karena ini adalah UU untuk menguntungkan kepentingan pribadi.** Ini jadi bukti bahwa demokrasi kita cuma pajangan dan dalam kenyataannya para anggota parlemen telah kembali ke “**Baino-krasi**” (kekuasaan oleh kaum elit).

Penelitian *La'o Hamutuk* menemukan bahwa UU ini lebih rakus daripada standar-standar internasional umum untuk UU Pensiun. Di hampir semua negara pensiun di bawah 100% gaji, dan tidak dibayarkan sebelum orang mencapai umur berhenti kerja. Juga, orang harus bekerja banyak tahun sebelum mereka berhak menerima pensiun yang signifikan, dan mereka membayar bagian dari gaji ke dalam dana pensiun.

Di bawah RUU Timor-Leste orang yang tidak bekerja, yang tidak memberi kontribusi pada pembangunan negara ini, akan mencuri uang dari negara kita. Banyak anggota Parlemen Timor-Leste punya karir lain – mereka juga bekerja sebagai pengusaha, dosen dan konsultan – dan tidak masuk akal bahwa mereka menerima pensiun negara sementara mereka masih hidup secara produktif.

Berdasarkan analisa kami di atas, kami ingin membuat beberapa rekomendasi:

- √ Parlemen Nasional mesti memeriksa kembali UU tersebut dengan pertimbangan terhadap dasar keberlanjutan sosial, ekonomi dan keuangan kita.
- √ Harus ada diskusi umum untuk setiap RUU dari Parlemen, yang harus menerima pertimbangan dari masyarakat.
- √ Parlemen harus mendengarkan suara dari yang memilih mereka, dan menjawab kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal kita, termasuk pertanian, irigasi, pemasaran produk-produk lokal, pendidikan untuk semua, dan dukungan secukupnya pada PNTL.
- √ Daripada membayar pelayanan kesehatan khusus di luar negeri untuk mantan anggota Parlemen dan pejabat resmi, menurut pendapat *La'o Hamutuk* uang itu harus digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan di dalam negara kita, khususnya di daerah, karena itu akan membantu jauh lebih banyak orang. Sementara kebanyakan orang Timor-Leste cuma punya sedikit akses untuk pelayanan kesehatan, mantan pejabat resmi tidak semestinya punya hak-hak istimewa.
- √ Mengevaluasi dan menjalankan rencana pensiun untuk semua pegawai negeri, yang juga termasuk anggota Parlemen, pejabat resmi tinggi dan pekerja lain di Timor-Leste, daripada menjalankan program pensiun-pensiun khusus untuk mereka sendiri dan beberapa lain saja.
- √ Berlaku untuk semua rencana pensiun, orang yang sehat tidak semestinya menerima pensiun sementara mereka masih cukup muda.

Presiden Republik tidak boleh mengesahkan UU ini, yang memperbolehkan beberapa orang memanen kekayaan negara ini sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan. Jika tidak dihentikan, ini akan menjadi korupsi oleh parlemen nasional, menggunakan uang negara.

Kami masih berharap bahwa anggota Parlemen akan melayani kepentingan masyarakat yang memilih mereka. Tetapi kalau Parlemen tetap akan promosikan UU ini, kami yakin bahwa pemilih akan kehilangan kepercayaan pada anggota-anggotanya, dan tidak akan memilih kembali mereka pada pemilu yang akan datang. ❖